

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Manajemen
Konsentrasi Manajemen Keuangan**



**Oleh :
MOHD. AMRAH RIDHO
NPM : 182510080**

**PROGRAM PASCA SARJANA MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-NYA hingga penulis dapat merampungkan Penyusunan Tesis dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir** ”. Penyusunan Teses ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya teses ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth :

1. Ibu Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M, selaku Rektor Universitas Bina Dharma Palembang..
2. Ibu Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR., M.M., M.T selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang.
3. Ibu Dr. Emi Suwarni, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen – S2 Universitas Bina Dharma Palembang.

4. Bapak Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si, selaku Pembimbing atas kesabaran dan perkenannya dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang.
6. Seluruh Staf Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang yang telah memberikan banyak kemudahan bagi Penulis.
7. Ibu Hj. Sofiah Yuhanis, SE, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Teman-teman pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
9. Istriku Yustiana Dewi, SKM yang telah begitu banyak mengorbankan waktu dan terus memberikan motivasi dalam pelaksanaan kuliah maupun penyusunan tesis.
10. Anakku M. Syauqhi Al Faaizi yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku
11. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, Ayuk, Kakak dan Adik yang selalu memberikan masukan, dukungan dan semangat yang tiada henti.
12. Teman-teman angkatan 33 R1 Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang terima kasih atas kebersamaan, bantuan, semangat, kerjasama dan pengalaman yang tak terlupakan selama ini.

13. Terimakasih untuk Orang-orang yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dan orang - orang yang terlewat disebutkan tetapi memiliki arti yang sama pentingnya bagi kehidupan saya serta semua pihak yang mendukung penyusunan tesis ini

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, November 2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan kebutuhan yang semakin kompleks dan serba percepatan menyebabkan adanya perubahan dan perlunya teknologi dalam lingkungan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan peralatan teknologi canggih yang mampu membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup secara lebih canggih, salah satunya adalah melalui teknologi informasi. Seiring perkembangan waktu, di era keterbukaan seperti saat ini kebutuhan manusia akan informasi yang tepat, akurat dan handal terus meningkat, menyebabkan para pembuat informasi harus lebih bekerja ekstra, karena informasi sudah harus menyentuh seluruh lini kehidupan mulai dari tingkat individual, kelompok dan tingkat organisasi. Terlepas apakah organisasi tersebut bergerak di bidang politik, ketatanegaraan, bisnis maupun pendidikan. Penggunaan informasi digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat yang tujuannya untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.

Teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dekade ini yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dibidang tersebut. Dengan berkembangnya dan majunya teknologi informasi, memacu organisasi untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai pengolah dan penyedia informasi. Saat ini teknologi informasi telah

menjadi faktor yang sangat dominan dalam penerapan sistem informasi sebagai solusi organisasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sistem informasi yang diterapkan didalam organisasi adalah komponen yang menjadi bagian dari organisasi bersama dengan individu-individu didalam organisasi untuk saling berintraksi dan saling memanfaatkan untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang berfungsi untuk membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Laudon dan Laudon terjemahan Sungkono (2008:22) mengemukakan definisi sistem informasi manajemen sebagai berikut :

Sistem informasi manajemen merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (mendapatkan), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan didalam organisasi

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam kegiatan suatu organisasi. Keberhasilan sistem informasi pada organisasi bergantung pada bagaimana sistem ini dijalankan dan memberikan kemudahan bagi para pemakainya serta mampu memanfaatkan teknologi yang digunakan tersebut.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh

pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, melakukan pembiayaan sendiri serta pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya pada organisasi sektor bisnis, tetapi juga pada sektor publik. Salah satu instansi sektor publik yang memanfaatkan teknologi sistem informasi adalah pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah teknologi sistem informasi telah menjadi kebutuhan untuk menunjang proses pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan penyusunan anggaran daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengolahan data keuangan. Kewajiban memanfaatkan teknologi informasi oleh pemerintah daerah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA keuangan dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan salah satunya untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Teknologi informasi suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individual sebagai anggota organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penggunaan sistem informasi dibidang Penyusunan Anggaran, merupakan proses penggabungan berbagai komponen baik yang mempunyai bentuk fisik (*hardware*), maupun non fisik (*software*) yang saling berhubungan dan berintegrasi secara harmonis yang akan membantu penggunaanya dalam mencatat, mengolah transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang selanjutnya menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

Dalam rangka mengemban amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA keuangan sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan SIMDA Keuangan salah satunya adalah

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan ini adalah untuk menghasilkan informasi keuangan secara cepat, tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai menerapkan SIMDA keuangan ini dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2012, dimana sebelumnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara manual dengan menggunakan Excel yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lebih lama serta tingkat kesalahan dalam penyusunan Anggaran tersebut lebih tinggi.

Pemanfaatan SIMDA keuangan khususnya dalam penyusunan anggaran sangat dibutuhkan, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja bagi penggunanya. Dimana dengan meningkatnya kinerja para individual sebagai anggota organisasi diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk menunjang kinerja pengguna SIMDA Keuangan, selain perancangan sistem yang harus baik dan sesuai dengan strategi serta budaya organisasi, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan sistem informasi adalah sikap atau perilaku pengguna (*user*)

dari sistem tersebut. Pengguna yang memiliki persepsi bahwa penggunaan SIMDA Keuangan akan memberikan manfaat, menyenangkan dan memudahkan dalam menyelesaikan tugasnya akan lebih mudah menerima dan menggunakan sistem baru secara konsisten, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja individu dibanding sebelum menggunakan sistem. Untuk membangun persepsi manfaat, persepsi menyenangkan dan mudahnya menggunakan suatu sistem informasi akuntansi yang baru diterapkan, tentunya harus didukung oleh desain sistem yang mudah digunakan (*user friendly*), sosialisasi dan pelatihan yang memadai, keterwakilan fitur menu yang ada dalam sistem sesuai dengan tugas *user*, jumlah informasi yang bisa diperoleh dan dukungan fasilitas yang tersedia (kondisi yang memfasilitasi)

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang kebijakan penerapan SIMDA keuangan khususnya tentang pemahaman pegawai, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan ini, maka penelitian mengambil judul sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir”

1.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari kebijakan penerapan SIMDA keuangan pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi sering kali dalam pelaksanaannya masih terdapat

kendala yang dihadapi, berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang SIMDA keuangan
- b. Masih lemahnya kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir?”

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud

Adapun maksud peneliti melakukan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerapan SIMDA Keuangan dalam penyusunan Anggaran
- b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan penerapan SIMDA Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan Publik

Dalam studi kepustakaan terdapat beberapa pakar yang mengemukakan tentang konsep kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Riant Nugroho (2006:3) mendefinisikan kebijakan publik dengan “*what government to do, what do it and what different it makes*”. Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan apa hasilnya yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Sedangkan Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik “*a projected program of goals, values and practices*” sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan prakti-praktik yang terarah (dalam Riant Nugroho, 2006:4).

Frederick (1963:79) mendefinisikan kebijakan sebagai “*a proposed course of action a person, group or government within a given environment providing obstacles and oppurtunities which the policy was proposed to utilize or apurpose*”. (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Menurut David Easton (dalam Solikhin Abdul Wahab, 2001:5) kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai secara paksa dan sah kepada para anggota masyarakat. Dari pendapat tersebut terdapat cirri-ciri khusus yang

melekat pada kebijakan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislatif, hakim administrator dan lain sebagainya. Merekalah yang dalam kesehariannya selalu terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem politik serta dianggap oleh sebagian besar masyarakat, sistem politik sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik dan berhak mengambil tindakan tertentu sepanjang masih dalam batasan-batasan peran dan kewenangan mereka.

Dari pengertian kebijakan tersebut, membawa implikasi tertentu dari konsep kebijakan publik (Wahab 2001:6-7), yaitu

1. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan, tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya (*public policy is purposive not oriented behavior rather than random or chace behavior*).
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. (*public policy consist of action rather than separate, discreate decision or action performed by govermant officials*).
3. Kebijakan memiliki sangkut paut dengan apa yang dalam kenyataan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu bukan apa yang diinginkan atau diniatkan akan dilakukan pemerintah (*policy is what govermant do, not what they say will do or what they intend to do*).

4. Kebijakan publik dapat bersifat negatif atau melarang dan juga dapat bersifat positif berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan (*public policy may either negative or positive*).
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, oleh karenanya memiliki kewenangan memaksa masyarakat untuk mematuhi (*public policy is based on law and is authoritative*).

Pendapat para ahli tersebut diatas dapat saling melengkapi, implementasi kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implementasi dari tindakan pemerintah yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b. Adanya *output* kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Salah satu yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan administrasi Negara adalah terbitnya kebijakan publik di wilayah tertentu. Kebijakan publik tersebut menjadi kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan

sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri dari dua nilai luhur yaitu kebijakan harus cerdas/berkualitas (*intelligent*), yang secara sederhana dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan maslahnya, disusun setelah melalui penelitian data dan ilmiah.

Kebijakan publik terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan
2. Bentuknya terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut konvensi-konvensi dan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kebijakan publik dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu *pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), *kedua*, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dan *ketiga*, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Kebijakan publik merupakan manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur.

Meski demikian, Riant Nugroho D berpendapat bahwa kebijakan publik bukan suatu hal yang mudah dibuat, dilaksanakan dan dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan sistem administrasinya dapat dilihat dari sistem kebijakan publik yang diambil dalam berbagai peraturan. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dan relevan.

Satu hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji masalah public maupun masalah-masalah public maupun masalah-masalah secara umum adalah bahwa suatu masalah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai masalah begitu saja tanpa melibatkan cara pandang orang terhadap masalah tersebut. Menurut Mark. E. Rushefky ada dua proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yaitu persepsi dan definisi. Persepsi merupakan penerimaan (*receiving*) dari satu peristiwa yang mempunyai konsekuensi terhadap orang atau kelompok, sedangkan definisi merupakan interpretasi dari peristiwa-peristiwa tersebut, memberinya makna dan membuatnya jelas. Suatu masalah melibatkan pandangan-pandangan subyektif seseorang. Orang yang terlibat langsung terhadap suatu masalah tentunya akan berbeda dalam membatasi suatu masalah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung terhadap masalah tersebut. Bagaimana orang mempersepsi dan mendefinisikan suatu masalah akan tergantung pada nilai-nilai kepercayaan dan ideologi yang dianutnya, pengalaman hidupnya yang kritis, seperti pengalaman, proses sosialisasi yang dijalankannya serta pengaruh media massa. Pada sisi yang lain kerumitan dalam mendefinisikan masalah juga disebabkan oleh kenyataan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai suatu masalah oleh seseorang kelompok ataupun oleh suatu Negara kadangkala menguntungkan individu, kelompok atau Negara lain. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan publik mengemukakan ada empat ciri pokok masalah kebijakan.

1. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain.

Pada kenyataannya masalah-masalah kebijakan merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai masses yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.

2. Subyektivitas. Kondisi eksternal menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu, masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis.
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bias ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2.1.2 Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William N. Dunn Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung

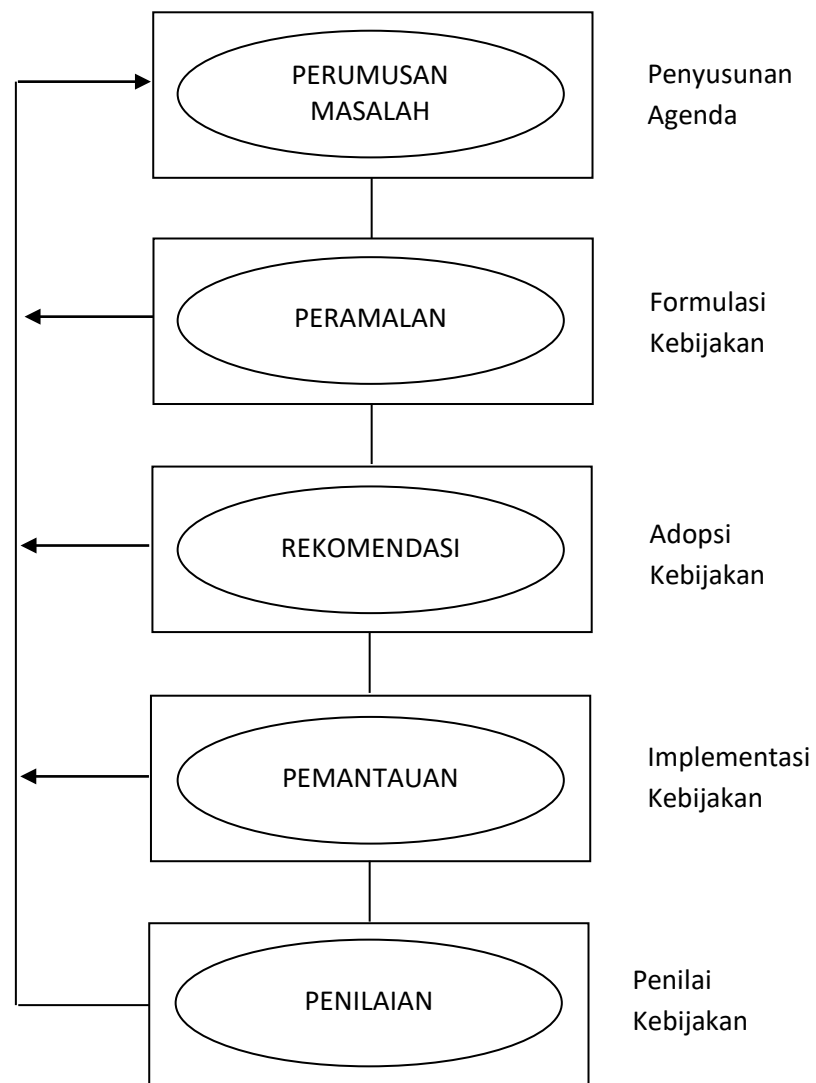
yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dalam tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengan, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi tersebut dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan.

Tabel 2.1 Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan

FASE	KARAKTERISTIK	ILUSTRASI
PENYUSUNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditundah untuk waktu lama.	Legislator Negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih

FASE	KARAKTERISTIK	ILUSTRASI
FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislative	Peradilan negra bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa ter tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan	Dalam keputusan mahkama Agung pada kasus <i>Ror. V. Wade</i> tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilam melalui aborsi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilakukan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusi	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki statur pengecualiapn pajak
PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	Kantor akuntansi public memantau program-program kesejahteraan social seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi



GAMBAR 2.1 KEDEKATAN PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
DENGAN TIPE-TIPE PEMBUATAN KEBIJAKAN

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial dan secara normative bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrative bagi implementasi kebijakan.

Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu

pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan dibidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rangkaian kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses intraksi antara satu perangkat tujuan dan

tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi dan teknik digunakan secara bersama dan simultan.

Secara entimologis pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta 1990:327). Istila implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merupakan implementasi secara pendek (Abdul Wahab 2005:64) *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide mean for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Definisi tersebut berarti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung (Abdul Wahab 2005:67). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian ini apabila dikaitkan dengan kebijakan, maka kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat bentuk hukum positif berupa undang-undang, peraturan pemeintah, keputusan peradilan dan lain sebagainya tetapi selanjutnya didiamkan, tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Suatu kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau akibat yang diinginkan.

Maszmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya "*Implementation And Public Policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul Wahab, 1997:65) dan Leo Agustino, 2006:139), mendefinisikan implementasi sebagai “*those action ny public and private individual group that are directed the achievement of objective set fort in prior dicisions*”: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. (Bambang Sunggono, 1994:137). Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negara. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002)

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usmanm 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaugin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Menurut reori Implementasi Kebijakan George Edwards III (dalam subarsono, 2011: 90-921). Implemetasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena betapapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitupula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan bisa dicapai. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edwards III menyatakan bahwa ada 4 (empat) variable krusial dalam implemantasi yaitu Komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap pelaksana (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan publik

Model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Model dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda. Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, dan gambar-gambar atau rumus-rumus matematis

mengenai fenomena yang dideskripsikan. Model abstrak inilah yang digunakan dalam kebijakan publik (Suharto, 2005 : 21) fungsi model adalah untuk memudahkan menerangkan suatu benda atau konsep.

- a. Membantu untuk memperoleh pemahaman tentang beroperasinya sistem alamiah dan sistem buatan manusia.
- b. Membantu dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan.
- c. Membantu menjelaskan hubungan antar elemen-elemen tersebut.
- d. Membantu dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakekat hubungan antar elemen.

Dalam hubungan dengan kebijakan sosial, model terutama dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme, serta menentukan strategi-strategi kebijakan sosial. Model implementasi memberi fokus perhatian yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang dari para pembuatnya dan ini menggambarkan banyak sekali faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau implementasi program (Wahab, 2005).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor dan tiap faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui faktor apa saja yang terlibat dalam implementasi program, maka berikut akan dijelaskan beberapa model.

2.1.4.1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan. Hubungan antara berbagai faktor mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan yang tentunya mempunyai standar dan sasaran yang harus dicapai.

Metode ini selanjutnya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Dikemukakan juga bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkait. Variabel bebas yang dimaksud adalah :

1. Ukuran standar dan tujuan kebijaksanaan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Ciri-ciri atau sifat Badan,Instansi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

2.1.4.2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier

disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*).

Mazmanian - Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel Intervening yaitu diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel Dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan

yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.1.4.3. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan

diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan

kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-

kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organisasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna.

Komunikasi dan koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

2.1.4.4. Model George Edward III

Model implementasi yang banyak digunakan dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah

meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor - faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu - individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai

maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar

dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik – teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi / pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

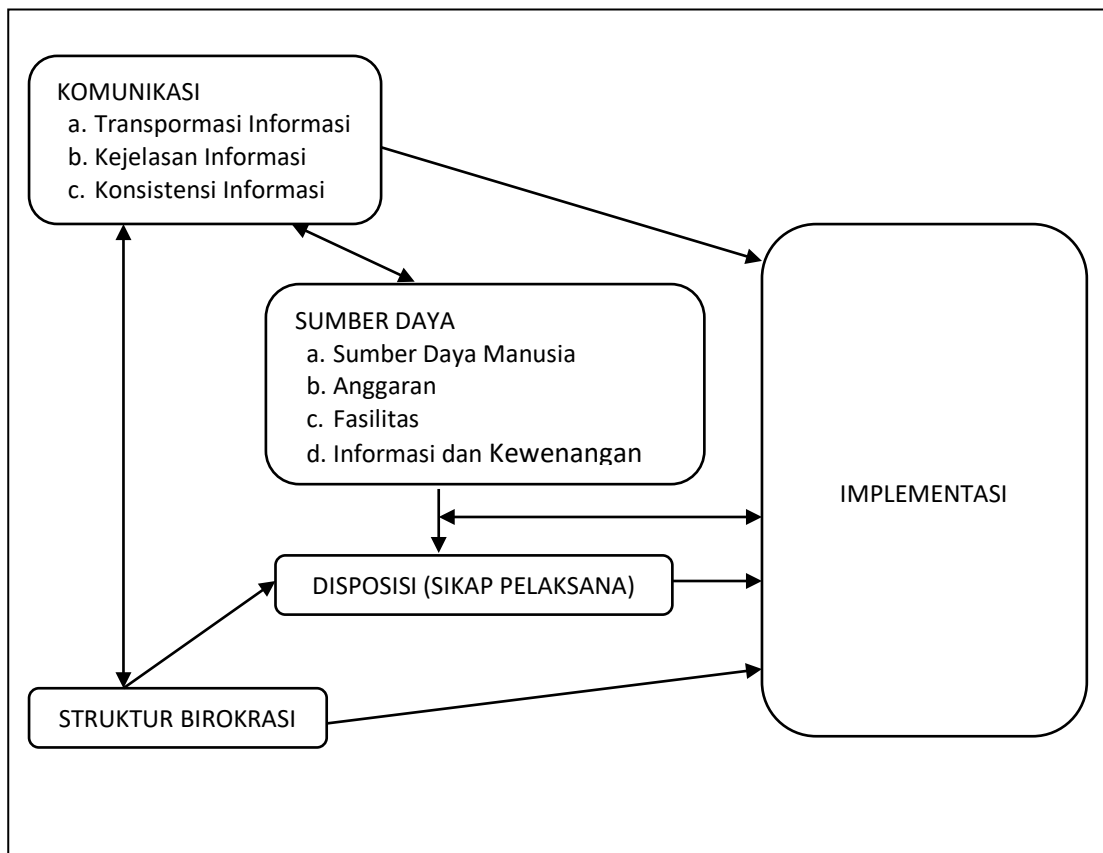
Menurut Edwards III ada 2 (dua) karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku atau *standar operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standar operating procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerja organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Meski demikian, SOP memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan control yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru dari birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut. SOP adalah petunjuk pelaksanaan kebijakan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa menganggi makna secara keseluruhan.

Karakteristik yang kedua dari birokrasi adalah fragmentasi, penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi.

Konsekwensi buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para pelaksana untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks yang memerlukan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintahan yang terpecah-pecah, padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Fragmentasi sebenarnya dimaksudkan sebagai penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Secara spesifik penelitian ini menggunakan teori Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pada pendapat Edward III yang berpendapat bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pernyataan apakah syarat agar implementasi kebijakan berhasil. Dalam kaitan dengan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan penerapan aplikasi SIMDA Keuangan dalam penyusunan anggaran pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan 4 (empat) variable : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, sebagaimana pendapat Goerge Edward III.



GAMBAR 2.2 MODEL IMPLEMENTASI MENURUT EDWARD III

Sumber : George III Edward :implementing public policy, 1980

2.1.5 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata yaitu Sistem, Informasi dan Manajemen. Menurut Sutanta (2003) sistem adalah “sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau sub sistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu hingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”. Sutanta (2007:46) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) sebagai “suatu tim

yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut McLeod (2010:11) sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut Kumorotomo (2007:7) “sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi” lebih lanjut Kumorotomo (2004:9) menjelaskan bahwa “unsur-unsur yang memiliki suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (*input*) pengolahan (*processing*) dan keluaran (*Output*)”.

Konsep Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen mendukung terhadap aktivitas pengelolaan data informasi terutama berkaitan dengan sumber informasi, ketepatan informasi, arus informasi dan perluasan dalam proses pengumpulan informasi.

Kata sistem membawa pada pemahaman tentang bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dalam mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Eric Kohler (1972:423) mengemukakan bahwa : Sistem adalah *A Collection of objects or events conforming to a plan*. Pendapat ini menunjukkan bahwa sistem dapat dipandang sebagai suatu kumpulan dari objek-objek tertentu atau kejadian-kejadian atau hal-hal yang disesuaikan dan dipadukan untuk suatu perencanaan tertentu. Cf. J.H.R Van de poel (1974) dalam Winardi (1999:2) mengartikan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen di antara

mana terdapat adanya hubungan-hubungan, elemen-elemen tersebut yang ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu.

Dari kajian beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau-bagian bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.

Secara umum Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.

Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan. Semua komponen tersebut saling berintraksi satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apabila salah satu dari komponen-komponen ini tidak ada maka sistem informasi tersebut tidak akan terwujud.

- 2 Komponen *Hardware* (perangkat keras)
- 3 Komponen *Software* (perangkat lunak)
- 4 Komponen *Brainware* (manusia)
- 5 Komponen *Procedure* (prosedur)
- 6 Komponen *Database* (basis data)
- 7 Komponen *Communication Network* (jaringan komunikasi)

Manfaat dan Kualitas Informasi

1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan mafaat kepada para pengguna. Menurut Sutanta (2003:11) manfaat dari informasi adalah:

a. Menambah Pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

b. Mengurangi ketidak pastian pemakai informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya

c. Mengurangi resiko kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi resiko kegagalan karena, apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

Informasi akan memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Kualitas Informasi

Nilai Informasi ditentukan banyak hal, diantaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto (2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) macam karakteristik yaitu:

1. Akurasi (*accuracy*)
2. Ketepatan waktu (*timelines*)
3. Relevan (*relevance*)
4. Agregasi (*agregacy*)
5. Pemformatan (*formatting*)

Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan mengukur keunikan (*uniqueness*), ketepatan (*conciseness*), kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan (*read ability*)

Imam Sudirman (1996:10) Sistem Informasi Manajemen Harus dirancang sesuai dengan kebutuhan kualitas yang telah ditetapkan, maksudnya sistem informasi manajemen yang dijalankan dengan tujuan memenuhi tuntutan peningkatan kualitas kerja atau produktivitas kerja terutama pada aspek informasi untuk pengambilan keputusan.

Sifat dari Sistem Informasi Manajemen

Menurut Georgr M. Scott bahwa sifat-sifat dari Sistem Informasi Manajemen adalah :

1. Merupakan sistem yang komprehensif
2. Sistem yang terkoordinasi
3. Sistem yang terintegrasi secara rasional
4. Memiliki subsistem informasi
5. Mengubah data menjadi informasi dengan bermacam-macam cara
6. Meningkatkan produktivitas
7. Sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer
8. Menggunakan kriteria kualitas yang telah ada

2.1.6 Sisten Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah

daerah. Penerapan aplikasi SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

1. Tujuan dan manfaat sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP:2008) adalah:

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap organisasi perangkat daerah
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksi jaringan SIMDA
- c. Sebagai salah satu media control bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dana
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-governance*
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good governance*

Manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA Keuangan (BPKP:2008) adalah:

- a. Database terpadu, tidak perlu input data yang sama berulang-ulang
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin).
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Artinya Aplikasi SIMDA ini dapat disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah.

2. Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP:2008) yaitu:

- a. Sistem Informasi eksklusif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing organisasi perangkat daerah

3. Aplikasi Sisten Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program yang ditunjuk untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan aplikasi ini pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

1. Perkembangan SIMDA Keuangan

SIMDA keuangan telah mengalami beberapa tahap perubahan

a. SIMDA Versi 1.0

Aplikasi SIMDA versi 1.0 ini merupakan sistem pengolahan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan

belanja daerah dan draf system akuntansi pemerintahan yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan baru berhasil diaplikasikan hanya beberapa pemerintah daerah.

b. SIMDA Versi 2.0

Aplikasi SIMDA Versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2004.

c. SIMDA Versi 2.1

SIMDA versi 2.1 mulai diaplikasikan pada tahun 2006 akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang aplikasi ini masih digunakan dengan beberapa kali penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

2. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan SIMDA keuangan khususnya penganggaran adalah:

- a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- c. Surat Penyediaan Dana (SPD)

3. Fungsi Program Aplikasi SIMDA keuangan

Fungsi pengimplementasian SIMDA Keuangan secara umum adalah:

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban)
- b. Menyusun anggaran lebih efisien dan akurat
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan
- e. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) Audit

4. Keunggulan dan manfaat SIMDA keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan adalah:

- a. Output atau laporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan fleksibel dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan
- b. Berbasis Windows
- c. Validasi inputan data lebih terjamin

- d. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas
- e. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi
- f. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran

Selain manfaat dibidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA diantaranya:

- a. Sesuai peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

- b. Kesiambungan Maintenance

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

- c. Transfer of knowledge (Transfer pengetahuan)

Poin yang paling penting dalam penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilakukan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA disuatu daerah diorientasikan satu kali untuk selamanya.

d. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

5. Pembiayaan Penerapan SIMDA keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap program aplikasi SIMDA Keuangan ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya, jika dibandingkan dengan program aplikasi lainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal ini yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem aplikasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA, dan kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut supaya berjalan lancar, diperlukan

adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim Asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggungjawab, pembantu penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung dari besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA Keuangan baik perencana maupun pelaksana (bendahara) pada level OPD.

2.1.7 Nilai-nilai pendukung Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan harus didukung dengan nilai-nilai dari aparatur pelaksana kebijakan, sehingga dalam penerapan kebijakan dapat berjalan efektif. Adapun nilai-nilai yang hendaknya harus dimiliki oleh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai aparatur pelaksana kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas dalam hal ini adalah berfikir, berkata dan berperilaku serta bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik serta prinsip-prinsip moral

2. Profesionalisme

Profesionalisme berarti bekerja secara tuntas dan akurat serta atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi. Tanggungjawab dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan nilai akuntabilitas, maka suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi

3. Sinergi

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta komitmen yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, adapun indikatornya antara lain :

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakn
- b. Adanya akses para informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu

5. Kesempurnaan

Kesempurnaan berkaitan dengan senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi serta memberikan yang terbaik.

2.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Mitami Dian M (2013), dalam penelitiannya berjudul Analisis Penerapan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasarkan oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu:

1. Secara umum pegawai telah memahami Makna SIMDA keuangan yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang diperuntukkan untuk memerintah daerah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah.
2. SIMDA keuangan terbagi atas tiga bagian yaitu penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan.
3. Simda keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

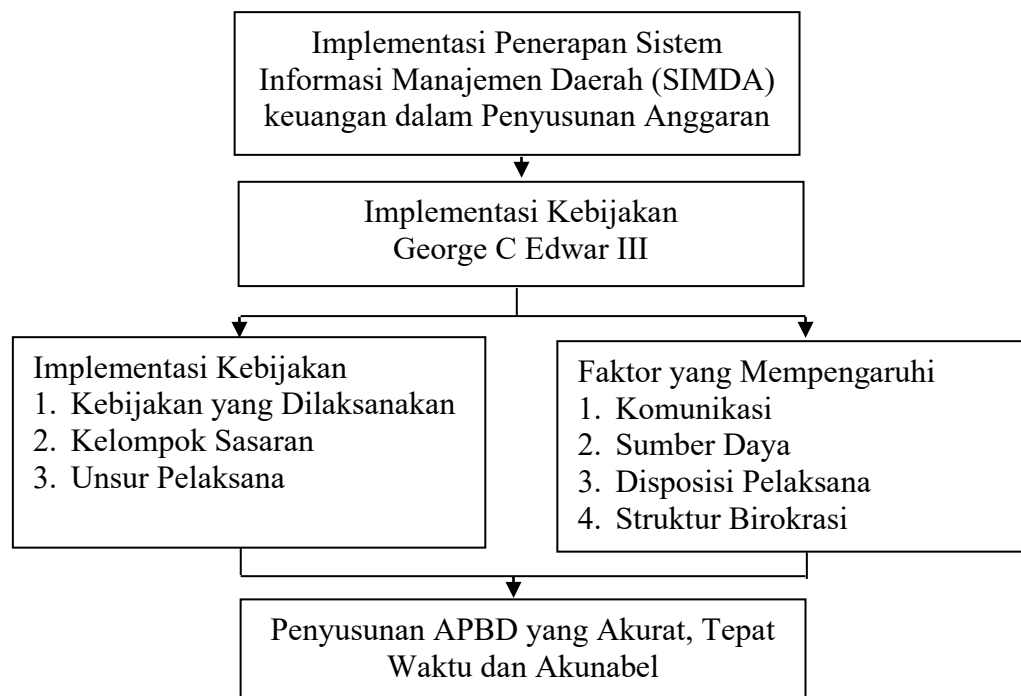
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Maka BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai auditor internal dan Pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merancang sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah.

Sebagai implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan

yang telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan model kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah dilapangan. Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis dan validasi. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan teori George C Edward III, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi akan menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasarkan oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. John W. Creswell (2010) menyebutkan bahwa “dalam studi fenomenologi yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui deskripsi dari orang yang menjadi partisipan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup partisipan”.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang diungkap dan digali. Dengan adanya fokus penelitian, konsentrasi suatu penelitian akan lebih sistematis, terarah dan terukur, *Strauss dan Corbin* (1990:60) berpendapat bahwa setiap penelitian memerlukan adanya fokus penelitian, karena bertujuan untuk:

1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang *inquiri*
2. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan / mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Artinya dengan melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti tahu persis

data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak diperlukan dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan (meski mungkin menarik tetapi karena tidak terlalu relevan).

Sejalan dengan hal tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada Implementasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir serta dokumen arsip Organisasi Perangkat Daerah berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data utama dalam penelitian menurut Lofland (1984) adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literature serta sumber lainnya yang berkaitan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, maka teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui :

1. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (Indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informan kunci (*key informan*) yang dibutuhkan diwilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Penanggungjawab SIMDA Keuangan Bidang Anggaran dan aktor-aktor lain yang memiliki kewenangan untuk mengoperasikan SIMDA Keuangan, ini bertujuan guna meningkatkan validasi informasi yang disampaikan.

2. Observasi

Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penyusunan anggaran serta kendala-kendala dalam melaksanakan melaksanakan penerapan SIMDA keuangan dan kondisi lain yang dapat

mendukung hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Studi Dokumentasi

Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara.

Materi yang diperlukan dalam penelitian penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah:

1. Data mengenai profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir mencakup Visi, Misi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia serta gambaran penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Data Informasi penyusunan anggaran yang dihasilkan dari Penerapan SIMDA Keuangan.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah unit analisis yang akan diteliti atau dianalisis (Singarimbun dan Effendi, 2006:55). Menurut Arikunto (2002:121) yang dimaksud unit analisis adalah satuan yang diperhitungkan dengan obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang

merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan SIMDA Keuangan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran penelitian dan biasanya ini ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.
2. Subyek masih terkait secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dalam memberikan informasi.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya akurasi data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya

adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*), kriteria ini berfungsi untuk : a) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat tercapai, b) mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*Transferability*), Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastiksn usaha verifikasi tersebut.

3. Kebergantungan. Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas. hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperthitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut.
4. Kriteria Kepastian (*confirmability*), Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, menurut Scriven (1971). Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan, subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan metode triangulasi antara sumber data dan data itu sendiri

- a. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk melakukan *cross check* dan penelusuran data sekunder.
- b. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi atas kesalahan dan menghindari subjektifitas sendiri.

3.8 Tehnik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan S. Nasution (1996:126) menjelaskan bahwa menyusun data berarti

menggolongkannya kedalam pola, tema atau kategori sehingga dengan demikian tidak akan terjadi chaos. Tafsiran atau interpretasi data artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep yang mencerminkan pandangan atau perspektif peneliti, dan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain. Hasil interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif, namun lebih bersifat hipotesis kerja yang senantiasa harus diuji kebenarannya dalam situasi lain.

Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri. S. Nasution (1996:18) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungannya. Interaksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini disebut juga penelitian naturalistic, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan data terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan

fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA Keuangan dalam penyusunan anggaran.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah:

- a. Data-data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
- b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya,
- c. Mencari keterkaitan antar tema
- d. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan, dan
- e. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual yang disajikan dalam bab V.

Silahkan upload proposal penelitian tesis Anda dengan komponen:

1. Cover (Judul, Nama dan NIM) + kata pengantar
2. BAB I PENDAHULUAN (LB, RM, TP dan MP)
3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
4. BAB III METODE PENELITIAN
5. REFERENSI (DAFTAR PUSTAKA) minimal 10 journal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: BumiAksara
- Bachri, B. S. 2010. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”. Jurnal Teknologi Pendidikan 10(1).
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT. Karya Unipress
- Creswell, John. W, 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus, Subando Margono. (2004). Sistem informasi manajemen: Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- McLeod, Raymond, 2010, Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat,
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru
- Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG, (2005). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**ANALISIS PENGARUH USIA, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN
PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN
(STUDI KASUS KARYAWAN SWASTA PADA SUDIRMAN OFFICE
TOWER)**

PROPOSAL PENELITIAN TESIS



Disusun Oleh :

Erwin

182510088

**UNIVERSITAS BINA DARMA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PALEMBANG
2018**

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan proposal penelitian tesis yang berjudul “ANALISIS PENGARUH USIA, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN (STUDI KASUS KARYAWAN SWASTA PADA SUDIRMAN OFFICE TOWER)” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan proposal penelitian tesis ini dilakukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Metodologi Riset Keuangan untuk Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Bina Darma Palembang.

Palembang, ... November 2019

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang *Well literate* masih kecil, yakni 29,66 %. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) menilai tingkat literasi keuangan masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kecil. Hanya mencapai 23,25 persen dengan literasi tertinggi pada sektor perbankan. Angka tersebut masih dirasa kecil meskipun sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) tingkat literasi keuangan dapat dipertimbangkan dari profil responden berdasarkan kesesuaian aspek *gender*, strata wilayah, usia, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan wawancara peneliti pada calon responden mengenai literasi keuangan, semua responden menjawab tidak mengetahui mengenai literasi keuangan. Sementara, banyak responden mengetahui tentang produk-produk keuangan seperti simpanan dan pinjaman. Beberapa responden juga menggunakan produk keuangan seperti menabung. Beberapa responden juga menggunakan emas sebagai investasi. Beberapa responden juga menggunakan surat berharga (saham dan obligasi) sebagai investasi.

Nidar dan Bestari (2012) menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Pengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa kategori yaitu berdasarkan demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, pengalaman keuangan, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik keluarga, aspirasi, dan lokasi geografis.

Literasi keuangan merupakan rangkaian proses dan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik (OJK, 2016). Pentingnya literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan, membuat penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pada karyawan swasta pada Sudirman Office Tower yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Chen and Volpe (1998) menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta yang berusia 18–22 tahun. Alasan untuk rendahnya tingkat pengetahuan dapat dikaitkan dengan usia muda 18 sampai 22 tahun dari peserta atau di bawah 30 tahun sebagai mayoritas dari mereka berada dalam tahap yang sangat awal siklus dari hidup finansial mereka. Saat tahap siklus ini, mereka memiliki sejumlah masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan umum tentang keuangan, tabungan dan pinjaman, dan asuransi. Saat periode ini, sebagian besar pendapatan mereka dibelanjakan konsumsi daripada investasi.

Menurut Notoatmodjo (2007) Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin bertambah usia semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

Menurut Icwani (2016) usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) usia tidak signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Taft, Hosein, dan Mehrizi dan Roshan (2013) menemukan terdapat hubungan positif antara usia dengan literasi keuangan dan *financial wellbeing*. Faktor usia sangat berperan penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan konsumen. Sebab semakin bertambahnya usia seseorang, seharusnya ia akan semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya dan akan lebih cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jenis kelamin merupakan sifat (keadaan) jantan atau betina (laki-laki atau perempuan).

Menurut Lynn dan Irwing (2002) mengatakan laki-laki lebih cerdas dari perempuan, ini dilihat dari IQ laki-laki rata-rata lima poin lebih tinggi dibanding perempuan. Menurut Nababan dan Sadalia (2012) memaparkan bahwa salah satu karakteristik respondennya yaitu laki-laki menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan relatif tinggi dari pada perempuan.

Menurut Andrew dan Linawati (2014) jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan swasta di Surabaya. Menurut Agusta (2016) *gender* menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) jenis kelamin signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Icwan (2016) jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Karena pria maupun perempuan memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan.

Menurut Suhardi (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang salah satunya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya.

Menurut Icwan (2016) pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Wiharno (2016) tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengetahuan keuangan, tinggi rendahnya perilaku keuangan dan tinggi rendahnya tingkat sikap keuangan. Menurut Agusta (2016) tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) pendidikan signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Karena pendidikan membantu seseorang untuk mengambil keputusan keuangan dengan baik. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendidikan tidak memiliki

hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Karena responden yang memiliki pendidikan yang tinggi, menganggap dirinya mampu untuk mengatur keuangannya dengan baik dalam pengalokasian maupun dalam pengambilan keputusan keuangan tanpa perlu membuat perencanaan keuangan terlebih dahulu. Sebaliknya, responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, justru merasa perlu untuk mengatur keuangannya dan akan merencanakan keuangannya sejak dini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan seseorang merupakan sesuatu yang diadakan, dibuat dan dijadikan oleh usaha yang dijalani oleh seseorang.

Menurut Chen dan Volpe (2002) tingkat pemahaman terhadap masalah keuangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Menurut Keynes (2009) Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) pendapatan penduduk meningkat tapi pengetahuan mereka akan keuangan atau jasa keuangan masih minim. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Karena semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin banyak seseorang

itu mengalokasikan dana untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

Manfaat praktis apabila masalah ini diselesaikan adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi karyawan swasta pada Sudirman Office Tower guna meningkatkan tingkat literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas seberapa besar tingkat literasi keuangan pada karyawan swasta pada Sudirman Office Tower

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti

1. Apakah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower secara parsial ?
2. Apakah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower secara simultan ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan analisis pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan (studi kasus karyawan swasta pada Sudirman Office Tower).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan secara parsial terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.
2. Untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap tingkat literasi keuangan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penambahan wawasan baru bagi dunia manajemen, serta memperkaya hasil penelitian tentang pengaruh usia, jenis kelamin, dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua individu guna meningkatkan literasi keuangan dalam mengelola aset keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian usia, pengertian jenis kelamin, pengertian pendidikan, pengertian pendapatan dan pengertian literasi keuangan, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, jenis data, sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2012, h.52) landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Untuk mendukung penelitian ini, landasan teori dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan literasi keuangan.

1. Usia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).

Chen and Volpe (1998) menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta yang berusia 18–22 tahun. Alasan untuk rendahnya tingkat pengetahuan dapat dikaitkan dengan usia muda 18 sampai 22 tahun dari peserta atau di bawah 30 tahun sebagai mayoritas dari mereka berada dalam tahap yang sangat awal siklus dari hidup finansial mereka. Saat tahap siklus ini, mereka memiliki sejumlah masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan umum tentang keuangan, tabungan dan pinjaman, dan asuransi. Saat periode ini, sebagian besar pendapatan mereka dibelanjakan untuk konsumsi daripada investasi.

Menurut Notoatmodjo (2007) Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin bertambah usia semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

Menurut Taft, Hosein, Mehrizi, dan Roshan (2013) menemukan terdapat hubungan positif antara usia dengan literasi keuangan dan *financial wellbeing*. Menurut Icwani (2016) usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) usia tidak signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan.

2. Jenis Kelamin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jenis kelamin merupakan sifat (keadaan) jantan atau betina. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tentang pemahaman keuangan pada perempuan lebih rendah dari pada pengetahuan laki-laki.

Menurut Lynn dan Irwing (2002) mengatakan laki-laki lebih cerdas dari perempuan, ini dilihat dari IQ laki-laki rata-rata lima poin lebih tinggi dibanding perempuan. Nababan dan Sadalia (2012) memaparkan bahwa salah satu karakteristik respondennya yaitu laki-laki menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan relatif tinggi dari pada perempuan.

Menurut Andrew dan Linawati (2014) jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan swasta di Surabaya. Menurut Agusta (2016) *gender* menunjukkan adanya

pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) jenis kelamin signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Icwan (2016) jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan.

3. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan.

Menurut Suhardi (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang salah satunya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didupakannya.

Menurut Icwan (2016) pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Menurut Wiharno (2016) tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengetahuan keuangan. Menurut Agusta (2016) tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Menurut Nunoo dan Andoh (2012) pendidikan signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga.

4. Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan seseorang merupakan sesuatu yang diadakan, dibuat dan dijadikan oleh usaha yang dijalani oleh seseorang.

Menurut Chen dan Volpe (2012) tingkat pemahaman terhadap masalah keuangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Menurut Keynes (2009) Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) pendapatan penduduk meningkat tapi pengetahuan mereka akan keuangan atau jasa keuangan masih minim. Menurut Bachrudin (2016) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Menurut Andrew dan Linawati (2014) tingkat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya.

5. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan rangkaian proses dan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik (OJK, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) menilai tingkat literasi keuangan masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kecil, hanya mencapai

23,25 persen dengan literasi tertinggi pada sektor perbankan. Angka tersebut masih dirasa kecil meskipun sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) tingkat literasi keuangan dapat dipertimbangkan dari profil responden berdasarkan kesesuaian aspek *gender*, strata wilayah, usia, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Nidar dan Bestari (2012) menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Pengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa kategori yaitu berdasarkan demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, pengalaman keuangan, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik keluarga, aspirasi, dan lokasi geografis.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Perbandingan dengan penelitian sebelum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

Judul	Variabel	Persamaan	Hasil
Studi Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah Pada Wilayah Gerbangkertasusila (Icwan, 2016)	➤ Literasi keuangan ➤ Jenis Kelamin ➤ Pendidikan ➤ Usia	Sama-sama membahas tentang usia, jenis kelamin dan pendidikan	➤ Jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. ➤ Pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. ➤ Usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan.

Hubungan Faktor Demografi Dan Pengetahuan Keuangan Dengan Perilaku Keuangan Karyawan Swasta Di Surabaya (Andrew dan Linawati, 2014)	➤ Pengetahuan keuangan ➤ Faktor demografi ➤ Perilaku Keuangan	Sama-sama membahas tentang faktor demografi (jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan)	➤ Faktor-faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, dan tingkat pendapatan serta pengetahuan keuangan seseorang memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan swasta di Surabaya ➤ Faktor demografi tingkat pendidikan ditemukan tidak memiliki hubungan yang signifikan
--	---	---	---

			terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya.
Karakteristik Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Manajemen Keuangan Personal (Survei Pada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Kuningan) (Wiharno, 2016)	➤ Literasi keuangan ➤ Pengetahuan keuangan ➤ Perilaku Keuangan	Sama-sama membahas tentang pendidikan	➤ Tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengetahuan keuangan (<i>financial knowledge</i>). ➤ Tingkat pendidikan dan tempat tinggal merupakan variabel yang sangat mempengaruhi

			tinggi rendahnya tingkat perilaku keuangan (<i>financial behavior</i>) ➤ Tingkat pendidikan dan tempat tinggal merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat sikap keuangan (<i>financial attitude</i>) ➤ Tinggi rendahnya tingkat manajemen keuangan personal
--	--	--	--

			ditentukan oleh adanya keterkaitan dan interaksi serta variasi diantara pengetahuan keuangan (<i>financial knowledge</i>), perilaku keuangan (<i>financial behavior</i>) dan sikap keuangan (<i>attitude</i>) ➤ Tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat
--	--	--	---

			manajemen keuangan personal (<i>personal financial manajemen</i>)
Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM Di Pasar Koga Bandar Lampung (Agusta, 2016)	➤ Literasi keuangan ➤ <i>Gender</i> ➤ Pendidikan ➤ Produk lembaga keuangan	Sama-sama membahas tentang jenis kelamin dan pendidikan	➤ <i>Gender</i> menunjukkan adanya pengaruh positif dan tidak signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan. ➤ Tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan.

			➤ Literasi keuangan yang ada di pasar Koga Bandar Lampung tergolong pada kriteria <i>well literate</i>
Sustaining Small And Medium Enterprises Through Financial Service Utilization : Does Financial Literacy Matter ? (Nunoo and Andoh, 2012)	➤ Literasi Keuangan ➤ Produk Lembaga Keuangan ➤ Faktor Demografi	Sama-sama membahas tentang usia, jenis kelamin dan pendidikan.	➤ Usia tidak signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. ➤ Jenis kelamin signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. ➤ Pendidikan signifikan dalam

			menjelaskan literasi keuangan.
The Relation Between Financial Literacy, Financial Wellbeing And Financial Concerns (Taft, Hosein, Mehrizi, dan Roshan, 2013)	➤ Literasi Keuangan ➤ Kesejahteraan Keuangan ➤ Masalah Keuangan	Sama-sama membahas tentang usia, dan pendidikan.	➤ Umur berkorelasi positif dengan literasi keuangan dan kesejahteraan keuangan ➤ Pendidikan berkorelasi positif dengan literasi keuangan dan kesejahteraan keuangan ➤ Orang yang sudah menikah lebih melek finansial ➤ Literasi keuangan yang

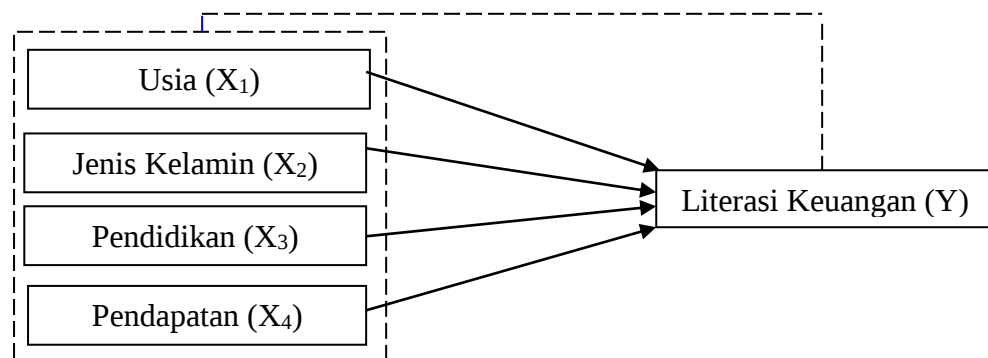
			tinggi menyebabkan kesejahteraan finansial lebih baik dan mengurangi masalah keuangan.
Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Faktor Demografi Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga (Bachrudin, 2016)	➤ Perencanaan Keuangan Keluarga ➤ Pengetahuan Keuangan ➤ Tingkat Pendapatan ➤ Tingkat Pendidikan	Sama-sama membahasa tentang pendapatan dan pendidikan	➤ Pengetahuan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga ➤ Tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan

			terhadap perencanaan keuangan keluarga. ➤ Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga.
--	--	--	---

Sumber : Erwin, 2017

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah yang diangkat, tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran peneliti ini untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan pokok yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :



Sumber : Erwin, 2017

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas. Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan (Garis Lurus). Sedangkan secara simultan (Garis Putus – putus) menggambarkan hubungan atau adanya pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Literasi Keuangan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014, h.134) perumusan penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

2.4.1 Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Secara Parsial

Menurut Notoatmodjo (2007) Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Taft, Hosein, dan Mehrizi (2013) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara usia dengan literasi keuangan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Iawan (2016) yang menemukan bahwa usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian Nunoo dan Andoh (2012) juga menemukan bahwa usia tidak signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H_1 = Usia berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan secara parsial.

2.4.2 Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Secara Parsial

Menurut Lynn dan Irwing (2002) mengatakan laki-laki lebih cerdas dari perempuan, ini dilihat dari IQ laki-laki rata-rata lima poin lebih tinggi dibanding perempuan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Andrew dan Linawati (2014) yang menyatakan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan para karyawan swasta di Surabaya. Hasil penelitian Nunoo dan Andoh (2012) juga mendukung bahwa jenis kelamin signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Hasil penelitian Agusta (2016) juga mendukung bahwa *gender* menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Icwan (2016) yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H_2 = Jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan secara parsial.

2.4.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Secara Parsial

Menurut Suhardi (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang salah satunya adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Agusta (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Hasil penelitian Nunoo dan Andoh (2012) juga mendukung bahwa pendidikan signifikan dalam menjelaskan literasi keuangan. Hasil penelitian Icwan (2016) juga mendukung bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian Wiharno (2016) juga mendukung bahwa tingkat pendidikan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengetahuan keuangan, tinggi rendahnya perilaku keuangan dan tinggi rendahnya tingkat sikap keuangan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Andrew dan Linawati (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Hasil penelitian Bachrudin (2016) juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H_3 = Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan secara parsial.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Secara Parsial

Menurut Keynes (2009) Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi

tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin banyak seseorang itu mengalokasikan dana untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Andrew dan Linawati (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku keuangan karyawan swasta di Surabaya. Hasil penelitian Bachrudin (2016) juga menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) yang menyatakan bahwa pendapatan penduduk meningkat tapi pengetahuan mereka akan keuangan atau jasa keuangan masih minim.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H_4 = Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan secara parsial.

2.4.5 Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Tingkat Literasi Keuangan Secara Simultan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) tingkat literasi keuangan dapat dipertimbangkan dari profil responden berdasarkan kesesuaian aspek *gender*, strata wilayah, usia, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Nidar dan Bestari (2012) yang menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi

keuangan. Pengelompokan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa kategori yaitu berdasarkan demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, pengalaman keuangan, pendidikan keuangan, kondisi ekonomi, karakteristik keluarga, aspirasi, dan lokasi geografis.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H_5 = Usia, Jenis kelamin, Pendidikan dan Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan secara simultan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014, h.147) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dikatakan metode kuantitatif, menurut Sugiyono (2012, h.8) karena metode penelitian ini bersifat kuantitatif / statistik dan data penelitian ini berupa angka.

3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014, h.38) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek Penelitian yang diteliti disini dibatasi pada pembahasan analisis pengaruh usia, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan (studi kasus karyawan swasta pada Sudirman Office Tower).

3.2.2 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2012, h.145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek pada penelitian ini adalah Karyawan Swasta pada Sudirman Office Tower yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Palembang.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2016, h.80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan swasta pada Sudirman Office Tower sebanyak 100 orang.

3.3.2 Sampel

Nazir (2014, h.270) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diperoleh dengan *cluster sampling* yaitu teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil atau *cluster*. Unit elementar tersebut dapat saja usaha tani, family, kepala keluarga, pabrik, firma, ulama, istri penjabat, dokter, kota, kampong, murid dan sebagainya (Nazir 2014, h.273). Unit elementar dari penelitian ini adalah kota Palembang. Hal ini dikarenakan karyawan swasta pada Sudirman Office Tower rata-rata berpendidikan sarjana.

3.4 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012, h.225). Data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode survei yaitu melalui kuesioner. Kuesioner disebar dengan mendatangi satu per satu calon responden, untuk melihat apakah calon memenuhi persyaratan sebagai calon responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang memiliki lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Rata-Rata (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). RR tidak disertakan dengan alasan menghindari jawaban yang mengandung kecenderungan tidak memiliki sikap.

Penskalaan metode Likert ini merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Selain itu penskalaan model Likert tidak memerlukan kelompok panel penilai sebab nilai skala tersebut tidak ditentukan oleh derajat variabelnya, melainkan ditentukan berdasarkan distribusi respon setuju atau tidak.

Tabel 3.1 Skala Likert

No	Pilihan	Singkatan	Bobot Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Cukup Setuju	CS	3
4.	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data berasal dari survei tertulis dalam bentuk kuesioner yang akan dilakukan oleh penulis kepada sampel dari populasi, yaitu karyawan swasta pada Sudirman Office Tower.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah penentuan variabel sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan variabel sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran variabel yang lebih baik.

Berdasarkan model analisis, maka variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Literasi keuangan konsumen. Literasi keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Indikator literasi, yaitu menurut Potrich, Vieira dan Kirch (2015) :

- 1) Pengetahuan Keuangan
- 2) Sikap Keuangan
- 3) Perilaku Keuangan

2. Variabel Independen (X)

a. Usia (X_1)

Usia responden adalah perhitungan angka/usia dari awal responden lahir sampai pada saat penelitian dilakukan. Usia responden diukur menggunakan kuesioner yang akan diberikan dalam satuan tahun. Indikator usia responden, yaitu menurut Depkes (2009) :

- 1) 15-25 tahun = Remaja
- 2) 26-35 tahun = Dewasa awal
- 3) 36-45 tahun = Dewasa Akhir
- 4) 46-55 tahun = Lansia Awal
- 5) 56-65 tahun = Lansia Akhir

b. Jenis Kelamin (X_2)

Jenis kelamin (*gender*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel jenis kelamin adalah dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan menjadi 2 indikator, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Perempuan

c. Pendidikan (X_3)

Pendidikan adalah sebagai proses dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan. Indikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur dalam kuesioner, yaitu:

- 1) Tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- 2) Tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas)
- 3) Tamatan D3
- 4) Tamatan S1
- 5) Tamatan > S1

d. Pendapatan (X_4)

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan konsumen. Karena pendapatan merupakan sumber utama untuk mengelola keuangan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2008) rata-rata pendapatan per bulan :

- 1) $< 1.500.000$ = Pendapatan Rendah
- 2) $1.500.000 - 2.500.000$ = Pendapatan Sedang
- 3) $2.500.000 - 3.500.000$ = Pendapatan Tinggi
- 4) $> 3.500.000$ = Pendapatan Sangat Tinggi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut. Didapatkan indikator pendapatan responden, yaitu :

- 1) $< 1.500.000$ = Pendapatan Sangat Rendah
- 2) $1.500.000 - 2.500.000$ = Pendapatan Rendah
- 3) $2.500.000 - 3.500.000$ = Pendapatan Sedang
- 4) $3.500.000 - 5.000.000$ = Pendapatan Tinggi
- 5) $> 5.000.000$ = Pendapatan Sangat Tinggi

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Literasi Keuangan Konsumen (Y)	Tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi cara mengelola keuangan.	1) Pengetahuan keuangan 2) Sikap Keuangan 3) Perilaku Keuangan	Likert

2.	Usia (X_1)	Perhitungan angka / usia dari awal responden lahir sampai pada saat penelitian dilakukan.	1) 15-25 tahun = Remaja. 2) 26-35 tahun = Dewasa awal. 3) 36-45 tahun = Dewasa Akhir. 4) 46-55 tahun = Lansia Awal. 5) 56-65 tahun = Lansia Akhir.	Likert
3.	Jenis Kelamin (X_2)	Perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu.	1) Laki-laki 2) Perempuan	Nominal

4.	Pendidikan (X ₃)	Sebagai proses dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan.	1) Tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) 2) Tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas) 3) Tamatan D3 4) Tamatan S1 5) Tamatan > S1	Likert
----	---------------------------------	--	--	--------

5.	Pendapatan (X ₄)	Jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.	1) < 1.500.000 = Pendapatan Sangat Rendah 2) 1.500.000 – 2.500.000 = Pendapatan Rendah 3) 2.500.000 – 3.500.000 = Pendapatan Sedang 4) 3.500.000 – 5.000.000 = Pendapatan Tinggi 5) > 5.000.000 = Pendapatan Sangat Tinggi	Likert
----	---------------------------------	---	--	--------

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan, antara lain :

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2012, h. 52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2012, h. 47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

3.7.3 Analisis Regresi

Menurut Ghazali (2012, h.96) Analisis Regresi adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Literasi Keuangan

a = Konstanta

B_1, B_2, B_3, B_4 = Koefisien

X_1 = Usia

X_2 = Jenis Kelamin

X_3 = Pendidikan

X_4 = Pendapatan

e = Tingkat Kesalahan (Error)

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas

3.7.4.1 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2012, h. 105) uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen)

3.7.4.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012, h. 110) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012, h. 139) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3.7.4.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012, h. 160) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

3.7.4.5 Uji Linearitas

Menurut Ghozali (2012, h. 166) uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik.

3.7.5 Uji Hipotesis

Untuk uji hipotesis, penulis menggunakan uji t dan uji f.

3.7.5.1 Uji t

Menurut Ghozali (2012, h. 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.7.5.2 Uji F

Menurut Ghozali (2012, h. 98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta 2016, *Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*, Skripsi S1, Universitas Lampung, Diakses tanggal 27 November 2019, dari researchgate.net.
- Andrew dan Linawati 2014, *Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan dengan Perilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya*, Skripsi S1, Universitas Kristen Petra, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://studentjournal.petra.ac.id>.
- Arikunto 2012, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta.
- Bachrudin 2016, *Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Faktor Demografi terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari eprints.perbanas.ac.id.
- Codot**, William 2016, *Literasi Keuangan*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <https://prezi.com>.
- Fadlil 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://satriodamarpanuluh.blogspot.co.id>.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ichwan 2016, *Studi Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah pada Wilayah Gerbangkertasusila*, Skripsi S1, STIE PERBANA, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://eprints.perbanas.ac.id>.
- Iswantoro dan Anastasia 2013, *Hubungan Demografi, Anggota Keluarga dan Situasi dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Pembelian Rumah Tinggal Surabaya*, *Jurnal Finesta Vol.1, No.2, (2013) 125-129*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari researchgate.net.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti Kata Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan & Pendapatan*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://kbbi.web.id>.
- Keynes 2009, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari cas2.umkc.edu.

Lynn dan Irwing 2002, *Sex Differences in General Knowledge, Semantic Memory and Reasoning Ability*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari <https://onlinelibrary.wiley.com>.

Lusardi, Annamaria dan Olivia, Mitchell 2012, *Financial Literacy and Retirement Preparedness : Evidence and Implications for Financial Education Program, Bussiness Economic*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari <https://www.dartmouth.edu>.

Lusardi & Mitchell 2014, The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature* 2014, 52(1), 5-44, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari gflec.org.

Martani, dkk, 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta : Salemba Empat.

Masyarakat 2012, *Pengetahuan dan Hal yang Mempengaruhinya*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari <http://kmasyarakat.blogspot.co.id>.

Nababan, Darman dan Sadali, Isfenti 2013, *Analisis Personal Financial dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Skripsi S1, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari <http://usu.ac.id>.

Nasrum 2016, *Melek atau Tidak, Ini Indikator untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan Anda*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://intisari.grid.id>

Nidar & Bestari 2012. Personal Literacy Among University Students (Case Study at Padjajaran University Students, Bandung, Indonesia, *World Journal of Social Sciences Vol.2. No.4. July 2012. Pp. 162-171*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari www.academia.edu.

Nunoo dan Andoh 2012, *Sustaining Small and Medium Enterprises through Financial Service Utilization: Does Financial Literacy Matter?*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, Dari <https://www.uclan.ac.uk>.

Notoatmodjo 2007, *Metode Penelitian Kesehatan*, Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan 2014, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://www.ojk.go.id>.

- Potrich, Vieira dan Kirch 2015, Determinants of Financial Literacy: Analysis of the Influence of Socioeconomic and Demographic Variabels, *Rev. contab. finanç. Vol.26 no.69 São Paulo Sept./Dec. 2015*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://www.scielo.br>.
- Rahmaliyah 2016, *Otoritas Jasa Keuangan Nilai Literasi di Sumsel Kecil*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://palembang.tribunnews.com>.
- Santoso 2015, *Menguasai Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo
- Sari 2014, *OJK : Pendapatan Meningkat, Masyarakat Cenderung Konsumtif*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari www.cnnindonesia.com.
- Sista 2010, *Teori-teori dalam Ekonomi Makro*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://maulitasista.blogspot.co.id>.
- Suhardi 2007, *Konsep Pengetahuan*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta
- Suheriadi 2017, *Literasi Keuangan Masih Hadapi Kendala*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <http://infobanknews.com>.
- Sugiyono 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Taft, Hosein, Mehrizi dan Roshan 2013, The Relation between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns, *International Journal of Business and Management Vol 8, No.11 (2013)*, Diakses pada tanggal 27 November 2019, dari <http://www.ccsenet.org>.
- Wiharno 2015, Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Serta Dampaknya terhadap Manajemen Keuangan Personal (Survei pada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kuningan), *JRKA Volume 1 Isue 2, Agustus 2015: 1-15*, diakses tanggal 27 November 2019, dari <https://journal.uniku.ac.id>.
- Xu, Liza dan Zia, Bilal 2012 , *Financial Literacy around the World : An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward*, Diakses tanggal 27 November 2019, dari <https://documents.worldbank.org>.